

Wacana

Peneggelaman Kapal dan Kedaulatan Laut

RAMAI polemik soal pro dan kontra peneggelaman kapal men-cuat baru-baru ini. Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dianggap berlebihan. Siplang pendapat pertama kali malahan muncul di pusran Istana. Presiden Joko Widodo mengapresiasi langkah Menteri Susi, sementara Wapres Jusuf Kalla dan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar kebijakan ini tidak diteruskan. Kementerian diminta lebih fokus pada upaya peningkatan produksi kelautan.

Sebenarnya yang dilakukan oleh Menteri Susi selama ini sesuai aturan perundangan yang berlaku. Harapannya akan ada efek jera bagi pelaku illegal fishing yang melanggar kedaulatan ekonomi kelautan kita. Sejauh ini setidaknya sudah 300 lebih kapal berbendera asing yang dimusnahkan demi penegakkan kedaulatan wilayah laut kita. Memang upaya menjaga kedaulatan negara yang tujuh puluh persen wilayahnya berupa laut bukan perkara gampang. Apalagi secara geopolitis dan geostrategis, wilayah Indonesia berada dalam posisi vital.

Kedaulatan Laut

Indonesia lekat dengan konsep archipelagic state. Sejarawan Maritim, A.B. Lapien menyebut archipelagic state lebih tepat diterjemahkan sebagai negara laut atau negara bahari bukan negara kepulauan. Archipelago mempunyai arti laut yang dita-

buri oleh sekumpulan pulau, bukan pulau-pulau yang dikelilingi lautan. Alih-alih negara kepulauan, Nusantara harus dipahami sebagai suatu entitas negara maritim.

Wilayah Indonesia yang terdiri atas darat, laut, dan udara merupakan satu kesatuan yang utuh. Mengamini semboyan TNI, NKRI harga mati, maka kedaulatan harus diperjuangkan oleh seluruh elemen bangsa ini. Denys Lombard berpendapat bahwa laut yang seolah memisahkan, sebenarnya justru mempersatukan. Lautan menjadi penghubung dan mempersatu pulau-pulau yang ada di Indonesia sekaligus sarana integrasi bangsa meliputi kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Maka kedaulatan laut mutlak harus dijaga.

Kedaulatan laut tak melulu soal kesiapan menghadapi serangan negara luar, melainkan juga dalam situasi damai. Nyatanya kasus lepas-tangan Malaysia pun sengketa Blok Laut Ambalat beberapa tahun yang lalu bukan semata-mata permasalahan sosial ekonomi. Sesungguhnya hal tersebut juga menjadi indikasi tumpulnya taring penegakkan kedaulatan laut di negara ini. Di sisi lain, negara juga kurang mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan

terhadap illegal fishing dengan peneggelaman kapal selama ini menunjukkan bangkitnya posisi tawar negara kita dalam menjaga kedaulatan laut. Tentu ke depan termasuk kapal-kapal besar milik para pemodal asing yang melanggar perlu diberi sanksi tegas yang tak kalah berani pula. Munculnya protes dari negara-negara tetangga akibat sanksi tersebut menjadi indikator bahwa negara kita tidak main-main terhadap penegakkan hukum di lautan.

Pada akhirnya, bukan soal sarana dan fasilitas pertahanan saja yang penting. Kecintaan terhadap Tanah Air dan bangsa jauh lebih penting. Semangat ini yang harus dimiliki dalam menjaga kedaulatan laut.

Maka silang pendapat soal peneggelaman kapal tak perlu berkepanjangan lagi mengingat cita-cita penegakkan kedaulatan negara. Tentu harus diimbangi dengan kepedulian pada sektor lain demi kesejahteraan rakyat. Tidak ada pelaut yang dilahirkan dari samudera yang tenang tapi ia akan dilahirkan dari samudera yang penuh terpaan badai, gelombang, dan topan. Semoga pelek Jayaveva Jayamahe terus bergelora di tengah gelombang samudera negeri ini. (*)

Hendra Kurniawan MPd

*Dosen Pendidikan Sejarah
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta.*

Oleh: Hendra Kurniawan

ancaman tersebut.

Belum lagi persoalan hukum yang terjadi di wilayah laut kita. Peristiwa masuknya para perompak yang menawan sekelompok nelayan berulang kali terjadi di Indonesia. Demikian pula pencurian kekayaan laut oleh nelayan asing sudah jamak kita dengar. Pada perkembangannya termasuk juga aktivitas perdagangan gelap, peredaran narkoba, perdagangan manusia, dan sebagainya yang memanfaatkan jalur laut menjadi keprihatinan terhadap kurang-nya pengawasan wilayah laut kita yang sangatlah luas.

Sektor kelautan jangan hanya dianggap penting takkala berperan dalam pemenuhan sumber kehidupan dan kebutuhan masyarakat. Laut merupakan garda terdepan bagi pertahanan kedaulatan negara bangsa dengan wilayah daratan berupa pulau-pulau yang luar biasa banyak jumlahnya. Tak berarti arogan namun ketegasan memang diperlukan. Tidak ada pemilik rumah yang mempersilakan maling menyatroni rumahnya. Di samping perlunya sikap saling menghormati dan hidup damai berdampingan antarnegara tetangga.

Maka kebijakan soal peneggelaman kapal menjadi bukti ketegasan negara. Respon pemerintah